



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 051.2/Kep. 673-Insp/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas**

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9).
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 92, Seri D.41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Jadwal dan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 051.2/Kep. 673 -Insp/2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/menevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan pada Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan
2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja;
3. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
4. Kegiatan reviu;
5. Kegiatan Monitoring dan evaluasi;
6. Kegiatan Jasa Konsultasi dan Sosialisasi;
7. Kegiatan Asistensi dan pendampingan; dan
8. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan audit yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa
3. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan
4. Mengidentifikasi faktor risiko
5. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan
 - a) Setiap audit ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b) Besaran risiko audit ditentukan dengan meminta masukan dari audit, dan jika audit memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c) Penetapan besaran risiko tiap audit dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
6. Menentukan tingkat risiko
7. Menetapkan peta risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur
8. Menetapkan jenis pengawasan, dilengkapi dengan peta audit yang meliputi audit, besaran risiko, tingkat risiko, tenaga auditor, tenaga tata usaha, dukungan dana serta sarana dan prasarana.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- a) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b) Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c) Pemberian layanan konsultasi;

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek:

- a) Kebijakan;
- b) Kelembagaan;
- c) Tugas Pokok dan Fungsi;
- d) Pengelolaan Keuangan;
- e) Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- f) Pencapaian Indeks Pelayanan Minimal, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b) Penyalahgunaan wewenang;
- c) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d) Pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a) Reviu Dokumen Perencanaan/RKA-SKPD;
- b) Reviu Laporan Keuangan;
- c) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d) Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- e) Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- g) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- h) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI);
- i) Reviu CPNS;
- j) Reviu Standar Satuan Harga (SSH);
- k) Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- l) Reviu Covid-19.

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a) Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- d) Dana Desa;
- e) Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- f) Aksi Pencegahan Korupsi;
- g) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- i) Penanganan Laporan Gratifikasi;
- j) Penanganan Benturan Kepentingan;
- k) Penilaian Internal Zona Integritas;
- l) Verifikasi LHKPN;
- m) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- n) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- o) Pelayanan Publik.

6. Kegiatan Jasa Konsultasi

Layanan Jasa Konsultasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi audit, dan atau member pedoman dan nasihat kepada audit yang mencakup fasilitasi, reviu pengembangan sistem, *self assessment* atas pengendalian dan kinerja, bimbingan dan pemberian nasihat untuk memberikan nilai tambah audit.

Dengan layanan konsultasi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Cirebon.

7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan Asistensi / pendampingan, meliputi :

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern dan kegiatan asistensi lainnya.

8. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultasi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib

dilakukan reviu secara berjenjang.

3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Cirebon.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah.

III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Jadual Program Pengawasan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 051.2 /Kep.07 /Insip/2020
Tanggal : December 2020
Tentang : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGgaran 2021

JADUAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

NO	URAJIAN / SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN		TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
		JAN	FEB							
SMP NEGERI										
26	SMP NEGERI 1 ASTANAPURA									
27	SMP NEGERI 1 CILEDUG									
28	SMP NEGERI 1 CIWARINGIN									
29	SMP NEGERI 2 CIWARINGIN									
30	SMP NEGERI 1 KEDAWUNG									
31	SMP NEGERI 1 LEWAHABANG									
32	SMP NEGERI 2 PLERED									
33	SMP NEGERI 2 SUSUKAN									
34	SMP NEGERI 1 BEBER									
35	SMP NEGERI 1 DUKURUTANG									
36	SMP NEGERI 1 GEMPOL									
37	SMP NEGERI 2 GUNUNG JATTI									
38	SMP NEGERI 1 KAPETAKAN									
39	SMP NEGERI 1 MUNDU									
40	SMP NEGERI 1 SUBANGGAJA									
41	SMP NEGERI 1 WALED									
42	SMP NEGERI 1 ARJAMINANGUN									
43	SMP NEGERI 2 BABAKAN									
44	SMP NEGERI 1 DEPOK									
45	SMP NEGERI 2 JAMBANG									
46	SMP NEGERI 2 KARANGSEMUNG									
47	SMP NEGERI 2 PALIMANAN									
48	SMP NEGERI 3 PALIMANAN									
49	SMP NEGERI 1 TENGAH TANI									
50	SMP NEGERI 1 GEGESIK									
51	SMP NEGERI 3 GEGESIK									
52	SMP NEGERI 1 KALIMEDI									
53	SMP NEGERI 2 KUANGENAN									
54	SMP NEGERI 1 PABEULAN									
55	SMP NEGERI 1 PABULAN									
56	SMP NEGERI 1 PANGURAGAN									
57	SMP NEGERI 1 PLUMBON									
Sekolah Dasar (SD)										
62	SD-SD di kabupaten Cirebon									
SKPD										
63	BANDAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									

NO	URAIAN / SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN			TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
		JAN	FEB	MAR	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT		
64	SEKRETARIAJ DAERAH										
		Menilai ketatahan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku	1.		1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	252,50		1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik		
65	DINAS KESEHATAN										
		Menilai ketatahan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku	1.	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Efektivitas(3E) 2. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 3. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	235,00		1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik			
66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
		Menilai ketatahan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku	1.	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Efektivitas(3E) 2. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 3. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	230,00		1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik			

RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN									
NO	URAIAN / SKPD	JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES	TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
67	DINAS PENDIDIKAN		1. Menilai ketetapan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengadaan Barang Jasa Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik		
68	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		1. Menilai ketetapan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengadaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik		
69	RSUD WALED		1. Menilai ketetapan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengadaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik		
70	RSUD ARJAWINANGUN		1. Menilai ketetapan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengadaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik		

NO	URAIAN / SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN			TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
		JAN	FEB	MAR							
78	II. Audit Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	252,00	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"	
79	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	230,00	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"	
80	DIMAS SOSIAL				Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	230,00	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"	
81	DINAS PERTANIAN				Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	230,00	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"	

NO	URAIAN / SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN						TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN							
82	Profilik Audit BADAN PENGETAHUAN DAN PENDIDAKTAN DAERAH							Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	175,00 * Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"		
83	DINAS KETAHANAN PANGAN							Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	175,00 * Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"		
84	DINAS PERHUBUNGAN							Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	175,00 * Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"		
85	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	175,00 * Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"		
86	Audit Kepengawadian BADAN KEPENGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	152,50 * Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"		

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN			TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MELI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV
87	Audit Kepatuhan Pengelolaan BMD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	152,50	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)					
88	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	152,50	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)					
89	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	152,50	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)					
90	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	152,50	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)					
91	Audit Kepatuhan Penyeleenggaraan Perijinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	152,50	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)					

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
92	DINAS KEPENDIDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL	JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES	Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas penuntutan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	152,50 - Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BSC) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (IPMS) 3. Kerangka kerja "Program Logic"		
86	Paket Pengadaan Barang dan Jasa (12 (dua belas) Paket)	II. Pemeriksaan Tujuan Tertentu	1. Menilai ketepatan/kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E) 3. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	Proses Pengadaan Barang dan Jasa dari mulai perencanaan dan	- Proses Pengadaan Barang dan Jasa	- Risiko terkait Kompleksitas Pengadaan Barang dan Jasa	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik		
88	Revisi LKPD	III. Pemeriksaan Lainnya	Meyakini LKPD per 31 Desember 2020 telah disusun berdasarkan SPP yang memadai dan disajikan berdasarkan	LKPD Pemerintah Kabupaten Cilebon Th. 2020, LK SKPD	Laporan yang disajikan oleh PPKD, Laporan Keuangan mendptl.RA, Neraca,	Mempertahankan Opini 1. Pengumpulan data melalui sampling	1. Pengumpulan data melalui BPK RI (WTP)		
89	Evaluasi LAKIP		1. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP ; 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ; tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (Result Orient Government) 3. Peningkatan Implementasi SAKIP; 4. Monitor tindaklanjut rekomendasi	1. Penilaian terhadap perencanaan strategis termasuk didalamnya penilaian terhadap penyajian dan informasi yang dapat di andalkan 2. Penilaian terhadap Program dan Kegiatan 3. Evaluasi terhadap kebijakan yang mendukung tercapainya kebijakan SKPD yang	1. Kesesuaian antara Perencanaan dengan pelaksanaan dan 2. Penilaian dokumentasi 3. Konsultasi/diskusi	Keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan	1. Penelitian dokumentasi 2. wawancara/klarifikasi 3. Konsultasi/diskusi		
90	Reviu Rencana Kerja Anggaran Th. 2021		Memberikan kenyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar biaya, kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran serta dilengkapi dengan dokumen pendukungnya	Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Th 2020	Perumusan dan penetapan dokumen Rencana Kerja Anggaran	Keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pelaporan	1. Penelitian dokumentasi 2. wawancara/klarifikasi 3. Konsultasi/Diskusi		

NO	URAIAN /SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES	TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
91	Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		1. Menabahntu Penaceritah Daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan berlaku	- Laporan realisasi dan penyerapan dana dan capaian Output Kegiatan DAK per jenis per bidang Tahun Anggaran sebelumnya	Pemerintah Alokasi DAK Fisik yang mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik kepada KPPN	1. Penelitian dokumen			
			2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output Kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	- Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output Kegiatan DAK per jenis per bidang Tahap I dan II		2. wawancara/Klarifikasi			
			3. Meningkatkan kualitas pemanantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik						
92	Reviu Laporan atas Penyeleggeran Pemerintah Daerah								
93	Reviu Rencana Kerja Penaceritah Daerah (RKPD)								
94	Reviu rencana Reformasi Pelaksanaan Reformasi								
95	Reviu pelaksanaan Zona Integritas								
96	Reviu CPNS								
97	Reviu Standar Satuan Harga (SSH)								
98	Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)								
99	Reviu Covid-19								
	IV. Pemeriksaan Khusus								
100	Penanganan Kasus Pengaduan	Memberikan Pendapat atas Hasil Pemeriksaan terhadap kebijakan, dan produk hukum lainnya yang dimiliki melanggar ketentuan	Pemerintah Kabupaten Cirebon	SKPD/UPTD, dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	Dengan Penyalahgunaan wewenang, indisipliner,	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Peneriksaan fisik			
	V. Jasa Konsultasi								
101	Konsultasi dan Sosialisasi	Memberikan pemahaman terkait kebijakan, produk hukum, dan prosedur terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi	Pemerintah Kabupaten Cirebon	SKPD/UPTD, dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	-				

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUMAN		TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
		JAN	FEB							
VI Monitoring dan Evaluasi										
102	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Penegakan Keuangan									
103	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
104	Aksi Pencegahan Korupsi									
105	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah									
106	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi									
107	Penanganan Laporan <i>Complaint</i>									
108	Penanganan Benturan Kepentingan									
109	Pemantauan Internal Zona Intensitas									
110	Verifikasi LHKPN									
111	Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi									
112	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah									
113	Penyelegaraan pemerintahan daerah									
VI Asistensi/Pendampingan										
114	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar									

Keterangan :



Tentative

BUPATI CIREBON,

IMRON